

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Gambaran Umum dan Hasil Pengumpulan Data

Objek yang menjadi sasaran peneliti ini ialah WPOP. Karyawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Selatan. Kantor tersebut bernaung di Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I serta beralamat di Gedung Keuangan Negara I Semarang, Jalan Pemuda No. 2, Lantai 1 & 2, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, 50188.

Walaupun letak kantornya berada di area Semarang Tengah, wilayah kerja KPP Pratama Semarang Selatan sebenarnya berfokus pada seluruh area administratif Kecamatan Semarang Selatan. Wilayah ini meliputi 10 kelurahan, yaitu Bulustalan, Barusari, Randusari, Mugasari, Pleburan, Wonodri, Peterongan, Lamper Lor, Lamper Kidul, dan Lamper Tengah. Alasan utama pemilihan KPP ini sebagai lokasi penelitian adalah karena karakteristik wajib pajaknya sangat sesuai dengan fokus riset yang dilakukan, yaitu untuk mengamati dan mengukur tingkat kepatuhan WPOP karyawan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, terutama dalam rutinitas pelaporan SPT Tahunan.

Guna mengukur fenomena kepatuhan tersebut, riset ini menggunakan tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Ketiga variabel bebas yang dimaksud terdiri atas pengetahuan pajak (X1), manfaat pajak (X2), dan kepercayaan pada

pemerintah (X3), sedangkan variabel terikat yang hendak diuji adalah kepatuhan wajib pajak (Y).

Penghimpunan data primer dilakukan melalui pembagian kuesioner kepada responden yang kriterianya telah diterapkan (metode *purposive sampling*). Kriteria yang dipakai meliputi: responden berstatus sebagai WPOP karyawan, memiliki NPWP atau NIK yang sudah tervalidasi sebagai identitas pajak, terdaftar secara resmi di KPP Pratama Semarang Selatan, serta memiliki pengalaman melaporkan SPT Tahunan. Proses pengumpulan data ini memakan waktu sekitar tiga minggu, dimulai dari tanggal 21 Mei 2026 sampai dengan 10 Juni 2026. Agar datanya terkumpul maksimal dan menjangkau lebih banyak responden, penyebaran kuesioner dilakukan lewat dua cara, yaitu secara daring (*online*) melalui *Google Form* dan secara luring (*offline*) dengan membagikan angket cetak langsung di lapangan.

Setelah pengumpulan data selesai, seluruh kuesioner yang masuk disortir kembali untuk mengecek kelengkapan jawaban dan kesesuaiannya dengan kriteria sampel. Ringkasan dari proses pengumpulan data tersebut disajikan pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4. 1
Hasil Pengumpulan Data

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Kuesioner yang diperoleh secara luring	81
2.	Kuesioner yang diperoleh secara daring (<i>Google Form</i>)	34
3.	Jumlah kuesioner yang diperoleh	115
4.	Responden <i>Google Form</i> yang tidak memenuhi kriteria penelitian	9
5.	Kuesioner yang memenuhi kriteria penelitian	106
6.	Kuesioner yang diolah sebagai sampel penelitian	100
7.	Persentase kuesioner yang diolah	100%

Sumber: Data primer yang diolah (2026)

Sebagaimana tertera pada Tabel 4.1, pengumpulan data penelitian dilakukan melalui dua metode, yaitu penyebaran kuesioner secara langsung dan penyebaran kuesioner secara daring menggunakan *Google Form*. Peneliti memperoleh sebanyak 81 kuesioner melalui penyebaran secara langsung dan 34 kuesioner melalui *Google Form*, sehingga total kuesioner yang diperoleh berjumlah 115. Adapun tautan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Lampiran 3. Dari 34 respons yang diperoleh melalui *Google Form*, terdapat 9 respons yang tidak memenuhi kriteria penelitian, karena responden bukan WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan, sehingga tidak dapat digunakan dalam proses pengolahan data. Dengan demikian, jumlah kuesioner yang memenuhi kriteria penelitian sebanyak 106 kuesioner, yang terdiri atas 81 kuesioner hasil penyebaran secara langsung dan 25 kuesioner hasil penyebaran melalui *Google Form*.

Berdasarkan perhitungan jumlah sampel pada Bab III, penelitian ini menggunakan 100 responden. Oleh karena itu, dari 106 kuesioner yang memenuhi

kriteria, dipilih 100 kuesioner sebagai sampel penelitian. Data tersebut selanjutnya dilah menggunakan IBM SPSS Statistics versi 26.

4.1.2 Deskripsi Karakteristik Responden

Bagian ini membahas latar belakang dari 100 responden yang data kuesionernya telah dikumpulkan. Karakteristik responden dipilah berdasarkan sejumlah aspek, meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, serta status administrasi perpajakannya. Ditinjau dari segi jenis kelamin, profil responden dapat dicermati pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4. 2
Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	52	52%
2.	Perempuan	48	48%
Total		100	100%

Sumber: Olah data SPSS V.26 (2026)

Mengacu pada Tabel 4.2, dari keseluruhan 100 responden, kelompok laki-laki sedikit lebih dominan dengan 52 orang (52%), sementara responden perempuan tercatat 48 orang (48%). Komposisi tersebut memperlihatkan gender nyaris berimbang antara laki-laki dan perempuan. Keadaan ini selaras dengan karakter wilayah Semarang Selatan sebagai pusat perkantoran, niaga, dan jasa yang menyerap tenaga kerja secara merata. Selain jenis kelamin, usia turut menjadi faktor penting sebagaimana tersaji pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4. 3
Data Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	Persentase
1.	20-25 tahun	33	33%
2.	26-30 tahun	35	35%
3.	31-40 tahun	15	15%
4.	>40 tahun	17	17%
Total		100	100%

Sumber: Olah data SPSS V.26 (2026)

Merujuk pada Tabel 4.3, responden didominasi oleh kalangan muda atau pekerja pada rentang usia produktif awal. Kelompok usia 26–30 tahun menempati urutan teratas dengan 35 orang (35%), disusul oleh kelompok usia 20–25 tahun sejumlah 33 orang (33%). Sisanya merupakan responden berusia 31–40 tahun sebanyak 15 orang (15%) dan yang berusia di atas 40 tahun sebanyak 17 orang (17%). Gambaran tersebut menunjukkan bahwa rata-rata sampel berasal dari generasi milenial dan Gen Z, yang umumnya telah terbiasa memanfaatkan teknologi digital untuk pelaporan pajak secara daring (*e-Filing*). Latar usia berkaitan erat dengan jenjang pendidikan terakhir responden, yang datanya dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4. 4
Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1.	SMA/SMK	28	28%
2.	D3	16	16%
3.	S1/D4	44	44%
4.	S2	12	12%
Total		100	100%

Sumber: Olah data SPSS V.26 (2026)

Berdasarkan Tabel 4.4, mayoritas responden berlatar pendidikan Sarjana (S1/D4) yakni 44 orang (44%), disusul lulusan SMA/SMK sebanyak 28 orang

(28%). Terdapat pula lulusan D3 sejumlah 16 orang (16%) serta S2 sebanyak 12 orang (12%). Mengingat lebih dari separuh responden (56%) merupakan lulusan perguruan tinggi, dapat diasumsikan bahwa mereka memiliki literasi yang memadai untuk mencerna informasi maupun ketentuan dasar perpajakan. Pengelompokan selanjutnya ditinjau dari sektor pekerjaan sebagaimana tersaji pada Tabel 4.5:

Tabel 4. 5
Data Responden Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	PNS/ASN	15	15%
2.	Pegawai Swasta	62	62%
3.	Pegawai BUMN/BUMD	16	16%
4.	Lain-lain	7	7%
Total		100	100%

Sumber: Olah data SPSS V.26 (2026)

Berdasarkan Tabel 4.5, pegawai swasta menjadi penyumbang sampel terbesar dengan jumlah 62 orang (62%). Posisi berikutnya diisi oleh pegawai BUMN/BUMD (16%), PNS/ASN (15%), dan jenis pekerjaan lainnya (7%). Dominasi karyawan swasta ini sejalan dengan tata kota wilayah Semarang Selatan yang memang berkembang sebagai salah satu pusat perkantoran dan bisnis swasta di Kota Semarang. Sebagai Langkah akhir untuk memastikan sampel yang diambil benar-benar memenuhi syarat administrasi, dilakukan pengecekan atas kepemilikan NPWP serta status terdaftar responden, yang datanya tersaji pada Tabel 4.6 dan Tabel 4.7:

Tabel 4. 6
Data Responden Berdasarkan Status NPWP

No.	Status NPWP	Jumlah	Persentase
1.	Memiliki NPWP	100	100%
2.	Tidak Memiliki NPWP	0	0%
Total		100	100%

Sumber: Olah data SPSS V.26 (2026)

Berdasarkan Tabel 4.6, dapat diketahui bahwa dari total 100 responden yang ditarik sebagai sampel penelitian, seluruhnya atau 100% (100 orang) telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hasil persentase mutlak ini menunjukkan bahwa seluruh responden telah memenuhi kriteria administratif paling dasar sebagai wajib pajak, sehingga mereka memiliki identitas perpajakan yang sah untuk melaksanakan dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Tabel 4. 7
Data Responden Berdasarkan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan

No.	Status Pendaftaran	Jumlah	Persentase
1.	Terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan	100	100%
2.	Tidak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan	0	0%
Total		100	100%

Sumber: Olah data SPSS V.26 (2026)

Selanjutnya, berdasarkan Tabel 4.7, hasil pengolahan data menunjukkan bahwa 100% (100 orang) responden terkonfirmasi resmi terdaftar sebagai WPOP Karyawan di KPP Pratama Semarang Selatan. Tidak ada satu pun responden (0%) yang berstatus di luar administrasi KPP tersebut. Kondisi ini menegaskan secara kuat bahwa proses penarikan sampel telah dilakukan dengan sangat akurat dan tepat sasaran, serta sepenuhnya memenuhi kriteria populasi penelitian yang telah ditetapkan sejak awal.

4.2 Statistika Deskriptif

Penelitian ini memuat sejumlah pertanyaan berbentuk skala Likert yang berkaitan dengan variabel independen (X) yakni pengetahuan pajak, manfaat pajak, dan kepercayaan pada pemerintah, serta variabel dependen (Y) yaitu kepatuhan WPOP karyawan di KPP Pratama Semarang Selatan.

Tabel 4. 8
Hasil Uji Analisis *Descriptive Statistic*

Variabel Penelitian	N	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Rata-rata (<i>Mean</i>)	Standar Deviasi
Pengetahuan Pajak (X1)	100	12	30	23.92	3.667
Manfaat Pajak (X2)	100	12	30	24.48	3.622
Kepercayaan pada Pemerintah (X3)	100	7	30	23.42	3.990
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	20	35	29.86	2.814

Sumber: Olah data SPSS V.26 (2026)

Mengacu pada Tabel 4.8, dapat dicermati gambaran umum sebaran tiap variabel penelitian. Pada variabel Pengetahuan Pajak, dari keseluruhan 100 sampel yang diolah, skor jawaban terendah (*minimum*) berada di angka 12 dan skor tertinggi (*maksimum*) menyentuh angka 30. Rata-rata (*mean*) pemahaman responden atas pajak berada di angka 23,92 dengan standar deviasi sebesar 3,667. Oleh karena nilai rata-ratanya jauh melampaui standar deviasinya, hal ini menandakan bahwa sebaran jawaban responden mengenai pengetahuan pajak cenderung merata serta tidak memperlihatkan sesenjangan pemahaman yang terlalu ekstrem antar karyawan.

Berikutnya, pada variabel Manfaat Pajak, sebaran datanya memiliki nilai *minimum* 12 dan *maksimum* 30. Rata-rata persepsi responden atas manfaat dari pajak yang mereka bayarkan tercatat 24,48 dengan standar deviasi 3,622. Nilai rata-

rata yang cukup tinggi ini mengindikasikan bahwa secara umum, sebagian besar karyawan di wilayah Semarang Selatan sebenarnya cukup menyadari dan bisa merasakan fungsi dari dana pajak bagi pembangunan atau fasilitas publik.

Sementara itu, untuk variabel Kepercayaan pada Pemerintah, terdapat sedikit dinamika pada sebaran datanya. Nilai minimal pada variabel ini menyentuh angka 7, yang merupakan skor terendah jika dibandingkan dengan variabel independen lainnya, sedangkan nilai maksimalnya tetap berada di angka 30. Meskipun ada responden yang memberikan penilaian rendah, rata-rata tingkat kepercayaannya secara keseluruhan masih tergolong baik, yaitu di angka 23,42 dengan standar deviasi 3,990. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun tingkat kepercayaan (*trust*) beberapa wajib pajak terhadap aparat atau pengelolaan dana pemerintah masih fluktuatif, mayoritas sampel tetap memiliki pandangan yang positif.

Terakhir, pada variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, rentang jawaban responden berada di antara nilai minimal 20 dan maksimal 35. Rata-rata tingkat kepatuhan berada di angka 29,86 dengan standar deviasi paling kecil di antara semua variabel, yakni sebesar 2,814. Nilai standar deviasi yang sangat rendah ini merupakan indikator yang sangat baik karena berarti jawaban responden sangat seragam atau konsisten. Tingginya nilai rata-rata kepatuhan ini juga mengonfirmasi bahwa secara perilaku, mayoritas WPOP Karyawan di KPP Pratama Semarang Selatan sudah taat dalam melaksanakan kewajiban administrasinya, terutama dalam hal pelaporan SPT Tahunan.

4.3 Hasil Analisis Data

4.3.1 Uji Kualitas Data

Setelah melihat gambaran umum data melalui statistik deskriptif, langkah selanjutnya adalah memastikan kualitas instrumen atau kuesioner yang digunakan. Uji kualitas data ini berperan penting guna menjamin bahwa alat ukur yang disebarkan kepada responden sungguh tepat sasaran dan konsisten. Pengujian kualitas data dalam penelitian terbagi menjadi dua tahap, yakni uji validitas dan uji reliabilitas.

4.3.1.1 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur tingkat kesahihan suatu kuesioner. Sebuah kuesioner dinyatakan valid apabila butir pertanyaan di dalamnya sanggup mengungkap secara akurat fenomena yang hendak diukur. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai korelasi (r hitung) dari tiap butir pertanyaan dengan nilai standar korelasi (r tabel).

Pada penelitian ini, jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Karena itu, dengan menggunakan batas signifikansi 5% (0,05) serta perhitungan derajat kebebasan atau *degree of freedom* ($df = n - 2 = 100 - 2 = 98$), maka diperoleh angka r tabel sebesar 0,196. Kriteria pengujiannya tergolong sederhana: apabila nilai r hitung melebihi r tabel (0,196), butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan layak digunakan.

Hasil perhitungan uji validitas untuk masing-masing variabel menggunakan SPSS disajikan secara berurutan pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 4. 9
Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Pajak (X1)

Variabel Pertanyaan	R Hitung	R Table	Keterangan
X1.1	0,675	0,196	VALID
X1.2	0,701	0,196	VALID
X1.3	0,669	0,196	VALID
X1.4	0,638	0,196	VALID
X1.5	0,551	0,196	VALID
X1.6	0,459	0,196	VALID

Sumber: Olah data SPSS V.26 (2026)

Hasil uji validitas pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa keenam butir pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel Pengetahuan Pajak (X1) memiliki nilai r hitung lebih besar daripada r tabel sebesar 0,196. Nilai r hitung berada pada rentang 0,459 hingga 0,701. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa seluruh indikator mampu mengukur variabel pengetahuan pajak dengan baik sehingga seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian.

Tabel 4. 10
Hasil Uji Validitas Manfaat Pajak (X2)

Variabel Pertanyaan	R Hitung	R Table	Keterangan
X2.1	0,681	0,196	VALID
X2.2	0,658	0,196	VALID
X2.3	0,770	0,196	VALID
X2.4	0,687	0,196	VALID
X2.5	0,605	0,196	VALID
X2.6	0,415	0,196	VALID

Sumber: Olah data SPSS V.26 (2026)

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 4.10, seluruh item pertanyaan pada variabel Manfaat Pajak (X2) memenuhi kriteria validitas. Hal ini dibuktikan dengan nilai r hitung masing-masing indikator yang berada di atas nilai

r tabel (0,196), yaitu berkisar antara 0,415 sampai 0,770. Dengan demikian, seluruh butir pertanyaan mampu merepresentasikan variabel Manfaat Pajak sehingga dapat digunakan pada tahap analisis berikutnya.

Tabel 4. 11
Hasil Uji Validitas Kepercayaan pada Pemerintah (X3)

Variabel Pertanyaan	R Hitung	R Table	Keterangan
X3.1	0,639	0,196	VALID
X3.2	0,812	0,196	VALID
X3.3	0,768	0,196	VALID
X3.4	0,784	0,196	VALID
X3.5	0,581	0,196	VALID
X3.6	0,571	0,196	VALID

Sumber: Olah data SPSS V.26 (2026)

Mengacu pada hasil uji validitas pada Tabel 4.11, seluruh indikator dalam variabel Kepercayaan pada Pemerintah (X3) memperoleh nilai r hitung yang melampaui r tabel sebesar 0,196. Nilai korelasi setiap item berada pada kisaran 0,571 hingga 0,812, yang menunjukkan bahwa setiap butir pertanyaan memiliki tingkat validitas yang baik. Oleh karena itu, seluruh indikator pada variabel ini dinyatakan valid sebagai instrumen penelitian.

Tabel 4. 12
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel Pertanyaan	R Hitung	R Table	Keterangan
Y.1	0,501	0,196	VALID
Y.2	0,625	0,196	VALID
Y.3	0,566	0,196	VALID
Y.4	0,481	0,196	VALID
Y.5	0,558	0,196	VALID
Y.6	0,663	0,196	VALID
Y.7	0,449	0,196	VALID

Sumber: Olah data SPSS V.26 (2026)

Hasil pengujian validitas pada Tabel 4.12, memperlihatkan bahwa seluruh item pernyataan memenuhi syarat validitas. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai r hitung setiap indikator yang lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel sebesar 0,196, dengan rentang nilai antara 0,449 hingga 0,663. Berdasarkan hasil tersebut, seluruh item pertanyaan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan valid dan layak digunakan untuk mengukur variabel dependen dalam penelitian ini.

Secara keseluruhan, hasil uji validitas pada variabel Pengetahuan Pajak (X1), Manfaat Pajak (X2), Kepercayaan pada Pemerintah (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan memiliki nilai r hitung yang lebih besar daripada nilai r tabel sebesar 0,196. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian telah memenuhi kriteria validitas, sehingga setiap item pernyataan dinilai mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat dan layak digunakan dalam proses analisis data selanjutnya. Terpenuhinya syarat validitas ini menjadi dasar bagi peneliti untuk melanjutkan pengujian ke tahap uji reliabilitas.

4.3.1.2 Uji Reliabilitas

Setelah seluruh pertanyaan dinyatakan valid, pengujian dilanjutkan ke tahap uji reliabilitas. Uji reliabilitas ditujukan untuk mengukur sejauh mana instrumen tersebut dapat diandalkan (konsisten) dari waktu ke waktu. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila jawaban yang diberikan responden atas pertanyaan-pertanyaan tersebut stabil serta konsisten, sekalipun diuji dalam kondisi yang berbeda.

Metode yang diterapkan ialah perhitungan nilai *Cronbach's Alpha*. Berdasarkan standar pengambilan keputusan yang lazim digunakan dalam riset

perilaku dan ilmu sosial, suatu konstruk atau variabel dinyatakan reliabel secara memuaskan apabila menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Hasil perhitungan uji reliabilitas untuk keempat variabel dalam penelitian ini dirangkum pada Tabel 4.13 berikut:

Tabel 4. 13
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Cronbach Alpha	Standar Koefisien	N Off Items	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,660	0,60	6	Reliabel
Manfaat Pajak	0,701	0,60	6	Reliabel
Kepercayaan pada Pemerintah	0,777	0,60	6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,609	0,60	7	Reliabel

Sumber: Olah data SPSS V.26 (2026)

Berdasarkan Tabel 4.13, semua variabel penelitian menghasilkan nilai Cronbach's Alpha di atas standar minimal 0,60. Capaian tertinggi diraih variabel Kepercayaan pada Pemerintah (0,777), diikuti Manfaat Pajak (0,701), Pengetahuan Pajak (0,660), dan Kepatuhan Wajib Pajak (0,609). Dengan demikian, dapat ditarik simpulan bahwa keseluruhan instrumen kuesioner dalam penelitian ini andal (konsisten) serta memenuhi syarat kualitas untuk diteruskan ke tahap pengujian asumsi klasik serta pengujian hipotesis.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik pada penelitian ini dilakukan untuk memastikan kelayakan model regresi. Adapun tahapan uji yang digunakan meliputi uji normalitas, uji Multikolinearitas, serta uji heteroskedastisitas yang diperkuat dengan uji Glejser. Pengujian ini penting dilakukan agar model regresi linear

berganda yang digunakan menghasilkan estimasi yang tidak bias sehingga layak dipakai untuk menguji hipotesis penelitian.

4.3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ditunjukkan untuk mendeteksi apakah nilai residual atau variabel pengganggu di dalam suatu model regresi terdistribusi secara normal atau tidak (Ghozali, 2021). Pendekatan statistik yang diaplikasikan dalam penelitian ini ialah pengujian *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Kriteria pengambilan keputusannya ditetapkan pada taraf signifikansi 5% (0,05). Bila nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05, distribusi data dinyatakan normal. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, data dianggap tidak normal. Rincian hasil pengujian normalitas tersaji pada Tabel 4.14 berikut:

Tabel 4. 14
Hasil Uji Normalitas

Variabel	Jumlah Sampel (N)	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	100	0,076	Berdistribusi Normal

Sumber: Olah data SPSS V.26 (2026)

Mengacu pada Tabel 4.14, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang diperoleh sebesar 0,076. Karena angka 0,076 melampaui batas signifikansi 0,05 ($0,076 > 0,05$), dapat ditarik simpulan bahwa keseluruhan nilai residual pada model regresi ini terdistribusi dengan normal.

4.3.2.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 15
Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	TOL	CUT OFF	VIF	CUT OFF	Keterangan
1	Pengetahuan Pajak	0,967	> 0,10	1,034	< 10	Tidak terjadi Multikolinearitas
2	Manfaat Pajak	0,844	> 0,10	1,185	< 10	Tidak terjadi Multikolinearitas
3	Kepercayaan pada Pemerintah	0,869	> 0,10	1,151	< 10	Tidak terjadi Multikolinearitas

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

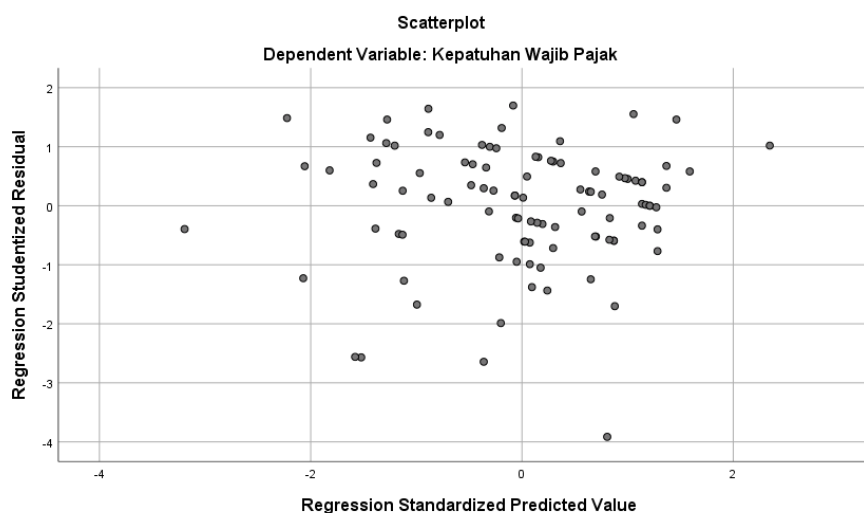
Sumber: Olah data SPSS V.26 (2026)

Berdasarkan Tabel 4.15, dapat dijabarkan bahwa nilai *tolerance* untuk variabel Pengetahuan Pajak berada pada angka 0,967; Manfaat Pajak pada 0,844; serta Kepercayaan pada Pemerintah pada 0,869. Seluruh nilai *tolerance* tersebut melebihi ambang batas 0,10. Di sisi lain, nilai VIF yang tercatat untuk Pengetahuan Pajak adalah 1,034; Manfaat Pajak sebesar 1,185; dan Kepercayaan pada Pemerintah sebesar 1,151. Mengingat nilai VIF ketiga variabel tersebut berada di bawah batas 10, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa model regresi ini terbebas dari multikolinearitas.

4.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Gejala lain yang perlu dihindari dalam asumsi klasik ialah heteroskedastisitas, yakni kondisi munculnya ketidaksamaan varians residual antarpengamatan pada model regresi. Untuk mendeteksinya, dilakukan pengamatan visual melalui grafik scatterplot. Apabila penyebaran titik-titik data tampak acak dan terdistribusi merata, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka model regresi dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas. Hasil pemetaan grafik tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.1:

Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Olah data SPSS V.26 (2026)

Berdasarkan tampilan visual pada Gambar 4.1, terlihat jelas bahwa titik-titik plot menyebar secara tidak beraturan (acak) serta berada secara merata di bagian atas maupun bawah titik 0 pada sumbu Y. Melalui pengamatan ini, dapat ditarik simpulan awal bahwa model regresi yang digunakan tidak mengidap gejala heteroskedastisitas serta layak untuk diproses lebih lanjut. Untuk memperkuat

kesimpulan visual tersebut, hasil ini kemudian diuji lebih lanjut secara statistik melalui Uji Glejser.

4.3.2.4 Uji Glejser

Guna memberikan kepastian secara statistik atas pembacaan grafik, penelitian ini turut menyertakan uji Glejser. Uji ini bekerja dengan meregresikan nilai *absolut* residual terhadap variabel-variabel independen (Ghozali, 2021). Pedoman keputusannya, apabila probabilitas signifikansinya $> 0,05$, model dipastikan terbebas dari heteroskedastisitas. Berikut rincian hasil uji Glejser:

Tabel 4. 16
Hasil Uji Glejser

Variabel Independen	Nilai Sig.	Kriteria	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	0,653	$> 0,05$	Bebas Heteroskedastisitas
Manfaat Pajak (X2)	0,604	$> 0,05$	Bebas Heteroskedastisitas
Kepercayaan pada Pemerinyah (X3)	0,086	$> 0,05$	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Olah data SPSS V.26 (2026)

Melalui Tabel 4.16 di atas, dapat dicermati bahwa probabilitas signifikansi seluruh variabel independen berada di atas 0,05, dengan rincian Pengetahuan Pajak sebesar 0,653; Manfaat Pajak sebesar 0,604; dan Kepercayaan pada Pemerintah sebesar 0,086. Dengan demikian, hasil pengujian statistik ini membuktikan secara meyakinkan bahwa tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Terpenuhinya seluruh uji asumsi klasik ini menjadi dasar bagi peneliti untuk melanjutkan ke tahap pengujian regresi linier berganda dan pengujian hipotesis.

4.3.3 Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4. 17
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi (B)	t hitung	Sig.	Ket
(Konstanta)	19.342	7.420	0.000	-
Pengetahuan Pajak (X1)	0.154	2.012	0.047	Signifikan
Manfaat Pajak (X2)	0.084	1.012	0.314	Tidak Signifikan
Kepercayaan pada Pemerintah (X3)	0.194	2.609	0.011	Signifikan

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Olah data SPSS V.26 (2026)

$$Y = 19.342 + 0.154X1 + 0,084X2 + 0,194X3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

$X1$ = Pengetahuan Perpajakan

$X2$ = Manfaat Pajak

$X3$ = Kepercayaan pada Pemerintah

Dari rumusan persamaan regresi tersebut, dapat dijabarkan interpretasi analisis sebagai berikut:

1. Variabel Pengetahuan Pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,154. Nilai tersebut menandakan adanya keterkaitan searah (positif) dengan kepatuhan pajak. Artinya, setiap kali pemahaman atau pengetahuan wajib pajak bertambah, tingkat kepatuhan pajaknya turut bergerak naik. Ringkasnya, literasi perpajakan yang kian baik akan senantiasa beriringan dengan menguatnya perilaku patuh wajib pajak.

2. Variabel Manfaat Pajak tercatat memiliki koefisien regresi sebesar 0,084. Nilai ini turut mencerminkan arah hubungan yang positif terhadap kepatuhan pajak. Maknanya, manakala persepsi wajib pajak atas manfaat yang mereka peroleh dari negara semakin tinggi, secara teoretis tingkat kepatuhan pajaknya juga akan meningkat (meski tingkat signifikansi pengaruh ini masih akan dibuktikan lebih lanjut melalui Uji t).
3. Variabel Kepercayaan pada Pemerintah memiliki koefisien regresi sebesar 0,194. Sebagaimana kedua variabel sebelumnya, variabel ini memberikan dampak yang positif. Hal ini dapat dimaknai bahwa kian kuat kepercayaan yang ditaruh wajib pajak terhadap integritas pemerintah, kian tinggi pula dorongan mereka untuk menaati aturan pajak. Dengan kata lain, penguatan rasa percaya terhadap institusi pemerintah akan senantiasa diikuti oleh meningkatnya kepatuhan pajak.

4.3.3.1 Uji T

Pelaksanaan uji statistik t pada dasarnya ditujukan untuk mengukur seberapa besar peran tiap variabel independen secara individual (parsial) dalam menjelaskan variasi variabel dependen, dengan taraf signifikansi sebesar 5% (Ghozali, 2021). Kriteria penarikan kesimpulannya, apabila probabilitas signifikansi (Sig.) $< 0,05$, dapat ditegaskan bahwa variabel X secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Y; sebaliknya, apabila Sig. $> 0,05$, diartikan tidak terdapat pengaruh yang nyata. Rincian hasil pengujian dapat dicermati pada Tabel 4.18.

Tabel 4. 18
Hasil Uji T

Variabel	Koefisien Regresi (B)	t hitung	Sig.	Ket
(Konstanta)	19.342	7.420	0.000	-
Pengetahuan Pajak (X1)	0.154	2.012	0.047	H1 diterima (signifikan)
Manfaat Pajak (X2)	0.084	1.012	0.314	H2 ditolak (tidak signifikan)
Kepercayaan pada Pemerintah (X3)	0.194	2.609	0.011	H3 diterima (signifikan)

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Olah data SPSS V.26 (2026)

Berdasarkan paparan tabel tersebut, keputusan pengujian hipotesis dapat ditarik sebagai berikut:

1. Variabel Pengetahuan Pajak memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,047. Oleh karena nilai 0,047 lebih kecil dari taraf 0,05, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) Diterima.
2. Variabel Manfaat Pajak menunjukkan nilai signifikansi pada angka 0,314. Mengingat nilai tersebut berada jauh di atas ambang batas 0,05, hal ini membuktikan bahwa persepsi atas manfaat pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena itu, hipotesis kedua (H2) Ditolak.
3. Variabel Kepercayaan pada Pemerintah tercatat memiliki nilai signifikansi sebesar 0,011. Nilai yang lebih kecil dari 0,05 ini memberikan simpulan yang tegas bahwa kepercayaan pada pemerintah terbukti berpengaruh signifikan

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) Diterima.

4.3.3.2 Uji F

Uji kelayakan model (Uji F) diterapkan untuk mengevaluasi apakah model regresi yang dibentuk sudah tepat dan layak (*goodness of fit*) dalam menguji hipotesis. Pengujian kelayakan ini bersandar pada nilai statistik F yang tersaji dalam tabel ANOVA. Apabila probabilitas signifikansinya (Sig.) berada di bawah 0,05, model regresi dinyatakan layak (fit) dan dapat digunakan; sebaliknya, apabila probabilitasnya melampaui 0,05, model tersebut dianggap tidak layak.

Tabel 4. 19
Hasil Uji F

Model	Jumlah Kuadrat	df	Rata-rata Kuadrat	F hitung	Sig.	Ket
Regresi	128.776	3	42.925	5.686	0.001	Model layak (fit)
Residual	724.784	96	7.550			
Total	853.560	99				

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Olah data SPSS V.26 (2026)

Tabel 4.19 menyajikan hasil pengujian ANOVA yang memperlihatkan capaian nilai F hitung sebesar 5,686 dengan probabilitas signifikansi pada angka 0,001 ($< 0,05$). Fakta bahwa nilai signifikansinya jauh lebih kecil dari 0,05 secara nyata memvalidasi bahwa variabel Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, dan Kepercayaan pada Pemerintah secara bersama-sama (simultan) mampu memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, model regresi penelitian ini dinyatakan layak untuk digunakan.

4.3.3.3 Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi bertujuan mengukur seberapa besar proporsi variasi variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model. Pada regresi linier berganda, nilai yang paling representatif untuk dicermati ialah *Adjusted R Square*. Kian mendekati angka 1, nilai *Adjusted R Square* menandakan kian kuatnya kemampuan variabel independen dalam memprediksi variabel dependen; sebaliknya, nilai yang mendekati angka 0 menandakan lemahnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan fenomena pada variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 4.20 berikut:

Tabel 4. 20
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.388	0.151	0.124	2.748

Sumber: Olah data SPSS V.26 (2026)

Berdasarkan hasil koefisien determinasi pada Tabel 4.20, diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* yang terekam sebesar 0,124 atau 12,4%. Temuan ini bermakna bahwa variasi pada tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (variabel dependen) mampu dijelaskan oleh kombinasi variabel independen (Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, dan Kepercayaan pada Pemerintah) sebesar 12,4%. Sementara itu, sisa proporsi yang cukup dominan, yakni sebesar 87,6% (diperoleh dari 100% – 12,4%), disebabkan serta dijelaskan oleh berbagai faktor lain yang tidak diajukan dalam model penelitian ini.

4.4 Interpretasi Hasil dan Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian terhadap hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak (X1) memenuhi kriteria signifikansi statistik, sehingga H1 dinyatakan diterima. Dengan demikian, pengetahuan pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP karyawan di KPP Pratama Semarang Selatan. Arah pengaruh yang positif tersebut bermakna bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki seorang wajib pajak, semakin besar pula kecenderungannya untuk patuh. Dengan kata lain, ketika pemahaman wajib pajak atas aturan, prosedur, batas waktu pelaporan, fungsi NPWP, hingga sistem *self-assessment* semakin baik, kesediaan mereka untuk menunaikan kewajiban perpajakan turut menguat.

Temuan ini selaras dengan *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991). Dalam kerangka teori tersebut, pengetahuan pajak berkaitan erat dengan *perceived behavioral control*, yaitu sejauh mana individu merasa mampu menjalankan suatu perilaku. Wajib pajak yang berbekal pengetahuan perpajakan yang memadai cenderung merasa lebih kompeten sekaligus lebih yakin dalam memenuhi kewajibannya, mulai dari menghitung pajak terutang, mengisi SPT Tahunan, sampai melaporkannya tepat waktu. Sebaliknya, keterbatasan pemahaman kerap menimbulkan rasa kesulitan dan ketidakberdayaan, sehingga kontrol perilaku yang dipersepsikan melemah dan pada akhirnya dapat menghambat terbentuknya kepatuhan.

Pola tersebut juga tercermin dari profil responden penelitian ini. Berdasarkan gambaran statistik deskriptif, mayoritas WPOP karyawan di wilayah Semarang Selatan memiliki tingkat pengetahuan pajak yang relatif baik dan cukup merata antarresponden. Kondisi ini diduga berkaitan dengan komposisi responden yang didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z berlatar pendidikan minimal sarjana (44%), kelompok yang umumnya lebih mudah memahami ketentuan perpajakan serta lebih terbiasa mengakses informasi kewajiban pajak secara daring.

Hasil penelitian ini memperkuat sejumlah kajian terdahulu. Haryanti *et al.* (2022) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Bekasi. Hasil senada diperoleh Graha *et al.* (2024) pada WPOP di KPP Pratama Probolinggo, yang mendapati pengetahuan perpajakan turut memengaruhi kepatuhan. Gahung *et al.* (2024) juga mengonfirmasi pengaruh positif dan signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2, sebagaimana ditemukan pula oleh Wirawan & Darmawati (2024) pada wajib pajak di Jakarta. Konsistensi temuan lintas konteks dan lokasi ini mengukuhkan kedudukan pengetahuan pajak sebagai prediktor kepatuhan yang andal.

Secara keseluruhan, hasil pengujian H1 menegaskan bahwa pengetahuan pajak merupakan faktor penting yang perlu terus diperkuat, terutama melalui sosialisasi perpajakan yang berkesinambungan dan edukasi yang menysasar wajib pajak secara tepat sasaran. Ketika wajib pajak memahami hak sekaligus kewajiban perpajakannya dengan baik, kepatuhan mereka dalam melaporkan SPT Tahunan maupun memenuhi kewajiban lain pun akan semakin meningkat. Oleh karena itu,

KPP Pratama Semarang Selatan disarankan untuk terus mengoptimalkan program edukasi perpajakan bagi WPOP karyawan sebagai upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kepatuhan.

4.4.2 Pengaruh Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis kedua (H2) memperlihatkan bahwa variabel manfaat pajak (X2) tidak memenuhi kriteria signifikansi statistik, sehingga H2 ditolak. Artinya, manfaat pajak tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP karyawan di KPP Pratama Semarang Selatan. Meskipun arah koefisiennya positif, kekuatannya secara statistik belum memadai untuk dinyatakan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi wajib pajak terhadap manfaat pajak memang bergerak searah dengan kepatuhan, tetapi belum cukup dominan untuk benar-benar membentuk perilaku patuh di wilayah penelitian.

Ditinjau dari *Theory of Planned Behavior*, manfaat pajak berhubungan dengan *attitude toward behavior*, yakni penilaian individu atas suatu perilaku berdasarkan dampak yang dirasakannya. Secara teoretis, wajib pajak yang meyakini pajak memberi manfaat nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik semestinya bersikap lebih positif terhadap kewajiban perpajakannya. Namun, pada WPOP karyawan, kepatuhan dalam melaporkan SPT Tahunan tampaknya lebih banyak digerakkan oleh kewajiban administratif dan pemahaman prosedural ketimbang oleh pertimbangan seberapa besar manfaat pajak yang langsung mereka rasakan.

Temuan ini dapat dipahami lebih jauh melalui karakteristik responden. Data deskriptif menunjukkan bahwa secara umum responden sebenarnya telah memiliki persepsi yang baik terhadap manfaat pajak. Akan tetapi, persepsi positif yang nyaris

seragam di hampir seluruh responden justru menyempitkan variasi jawaban, sehingga variabel ini tidak mampu membedakan secara tegas antara wajib pajak yang patuh dan yang tidak. Dengan kata lain, karena hampir semua responden menilai manfaat pajak secara positif, daya pembedanya terhadap variasi tingkat kepatuhan menjadi lemah.

Selain itu, bagi WPOP karyawan yang penghasilannya sebagian besar telah dipotong langsung oleh pemberi kerja melalui mekanisme PPh Pasal 21, pelaporan SPT Tahunan kerap dipandang sekadar formalitas administratif. Dalam situasi demikian, persepsi atas manfaat pajak yang sifatnya makro dan tidak langsung dirasakan secara personal menjadi kurang relevan sebagai pendorong kepatuhan dibandingkan dengan faktor-faktor yang lebih praktis dan personal. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Wiyati *et al.* (2019) yang membuktikan bahwa manfaat pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Surakarta. Karakteristik responden WPOP karyawan di Semarang Selatan sebagian besar berasal dari kalangan terdidik dengan kesadaran pajak yang relatif sudah terbentuk. Pada populasi yang umumnya telah memandang manfaat pajak secara positif, variabel ini cenderung seragam sehingga tidak lagi berperan sebagai faktor pembeda yang signifikan dalam mendorong kepatuhan.

Temuan ini mengisyaratkan bahwa persepsi manfaat pajak boleh jadi lebih relevan pada segmen wajib pajak yang belum memiliki kesadaran pajak yang kuat. Karena itu, upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi penggunaan dana pajak dan mengomunikasikan manfaat nyatanya kepada masyarakat tetap perlu dijalankan, terutama untuk mendorong kepatuhan sukarela pada kelompok wajib

pajak yang lebih luas. Meskipun tidak signifikan pada penelitian ini, persepsi manfaat pajak tetap berpotensi menjadi faktor pendorong kepatuhan pada segmen wajib pajak lain yang karakteristiknya berbeda dari WPOP karyawan di Semarang Selatan.

4.4.3 Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa variabel kepercayaan pada pemerintah (X3) memenuhi kriteria signifikansi statistik, sehingga H3 diterima. Dengan demikian, kepercayaan pada pemerintah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP karyawan di KPP Pratama Semarang Selatan. Di antara ketiga variabel independen, kepercayaan pada pemerintah memiliki koefisien regresi tertinggi. Hal ini memperlihatkan bahwa variabel tersebut memberikan kontribusi paling besar terhadap kepatuhan: semakin kuat kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Temuan ini menegaskan bahwa keyakinan wajib pajak terhadap integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan pemerintah dalam mengelola dana pajak merupakan faktor yang sangat strategis dalam mendorong kepatuhan.

Hal tersebut selaras dengan *Theory of Planned Behavior*, khususnya pada komponen norma subjektif, yang berkaitan dengan persepsi seseorang atas dorongan maupun harapan lingkungan sosialnya untuk berperilaku tertentu. Dalam konteks perpajakan, wajib pajak yang yakin bahwa pemerintah mengelola pajak secara adil dan transparan akan merasa memiliki pijakan moral yang kuat untuk patuh. Keyakinan semacam itu menumbuhkan kesadaran bahwa membayar dan

melaporkan pajak adalah tindakan yang benar secara sosial, sebab pajak yang disetorkan diyakini benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Pada titik inilah kepercayaan pada pemerintah memperkokoh norma subjektif wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Gambaran tersebut turut tercermin pada data deskriptif. Sebaran jawaban pada variabel kepercayaan pada pemerintah tergolong lebih lebar dibandingkan variabel lain, namun secara keseluruhan mayoritas responden tetap menaruh kepercayaan yang positif terhadap pemerintah. Justru variasi yang lebih besar inilah yang membuat variabel tersebut memiliki daya prediksi lebih kuat terhadap perbedaan tingkat kepatuhan dibandingkan variabel manfaat pajak, sehingga secara statistik kepercayaan pada pemerintah tampil sebagai prediktor yang lebih signifikan dalam model penelitian ini.

Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu. Zainudin *et al.* (2022) menemukan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak WPOP non-karyawan di Indonesia, dengan persepsi keadilan pajak sebagai variabel intervening. Wirawan & Darmawati (2024) memperoleh hasil serupa pada wajib pajak di Jakarta, yakni kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan. Pada tataran internasional, Appiah *et al.* (2024) di Ghana mengonfirmasi bahwa *trust in government* menjadi salah satu prediktor signifikan bagi *voluntary tax compliance*. Sejalan dengan itu, Gahung *et al.* (2024) pada wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Minahasa Tenggara juga menemukan pengaruh positif dan signifikan dari kepercayaan masyarakat

kepada pemerintah terhadap kepatuhan. Konsistensi temuan lintas wilayah maupun jenis pajak ini semakin meneguhkan validitas hasil penelitian.

Secara keseluruhan, hasil pengujian H3 memberikan implikasi penting bagi otoritas pajak, khususnya KPP Pratama Semarang Selatan. Demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan, penguatan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan otoritas pajak sudah selayaknya dijadikan prioritas. Upaya ini dapat ditempuh melalui peningkatan transparansi pelaporan penggunaan dana pajak, penguatan integritas aparat pajak, perbaikan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, serta komunikasi publik yang efektif tentang dampak nyata pajak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.